

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia saat ini berada dalam tahap menuju perbaikan kualitas. Semua itu tidak terlepas dari peran dan proses desentralisasi yang sudah berjalan di negara kita. Karena secara logika mutu pendidikan memang pada umumnya lebih baik jika dilakukan dengan menggunakan proses desentralisasi. Dengan Desentralisasi, pemerintah daerah lebih leluasa dan berkewenangan mengembangkan potensi daerahnya sendiri, karena pengertian dari desentralisasi itu sendiri adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah daerah akan lebih bertanggung jawab terhadap perkembangan daerahnya masing-masing. Berbagai studi di negara berkembang, terutama di Amerika Latin, menunjukkan keberhasilan desentralisasi bagi peningkatan mutu pendidikan meskipun di beberapa negara lain dilaporkan terjadi kegagalan desentralisasi pendidikan.¹ Bagi negara Indonesia untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan tersebut, tentu harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada, di samping juga harus bisa memenuhi kriteria desentralisasi pada umumnya. Sehingga tidak terjadi ketimpangan atau tarik-menarik antara berbagai kepentingan yang ada.

¹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan terus-menerus dilakukan baik secara konvensional maupun inovatif. Hal tersebut lebih terfokus lagi setelah diamanatkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Pemerintah sendiri dalam upaya mengembangkan kualitas pendidikan salah satunya ditunjukkan dengan adanya Kebijakan Menteri Pendidikan Nasional yang menghapus Ebtanas secara bertahap, SD tahun 2002 dan SLTP/SMA tahun 2003 lalu. Hal mendasar yang menjadi landasan pemikiran dihapusnya sistem evaluasi pendidikan melalui Ebtanas, salah satunya adalah dalam rangka memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemui dalam sistem Ebtanas, seperti praktik penyelenggaraan yang menyeleweng dan biaya yang tinggi.² Disamping itu juga merupakan wujud pemerintah dalam upaya mengembangkan sistem penilaian pendidikan yang lebih realistis dan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan agar lebih berkualitas dan bersaing, khususnya pada pendidikan dasar dan menengah.

Dengan dihapusnya sistem Ebtanas, maka penilaian hasil belajar akhir siswa di tentukan dengan Ujian Akhir Nasional atau yang umum disebut UAN. Sejalan dengan di terapkannya sistem UAN, maka kurikulum yang di gunakan juga disesuaikan. Kurikulum tersebut disebut Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004 atau KBK 2004. Di dalam kurikulum KBK 2004 ini terdapat ketentuan penilaian yang disebut dengan *benchmarking*.³ *Benchmarking* merupakan suatu penilaian pada

... .. nilai maksimal atau sempurna. Untuk

Nasional atau UN, di dalam UN ini pemerintah memberikan standar kelulusan yang harus di capai para siswa. Untuk tingkat SMU pada tahun ajaran 2002/2003 standar kelulusan yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar 3,01 dengan mengacu pada tiga mata pelajaran yang di ujikan secara nasional. Kebijakan standar kelulusan UN ini di atur dalam PP No 19 tahun 2005, dimana dari tahun ketahun nilainya terus dinaikkan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Hingga pada tahun ajaran 2005/2006 standar kelulusan yang harus dilewati para siswa untuk memperoleh kelulusan mencapai 4,26. Kebijakan tersebut tentu bukanlah suatu kebijakan yang mudah untuk di implementasikan, mengingat dalam pelaksanaannya banyak sekolah-sekolah yang belum sepenuhnya siap menerima kebijakan tersebut dan akhirnya banyak pelajar yang mengalami kegagalan untuk mencapai kelulusan.

Ironis memang, ketika pemerintah berusaha mengambil kebijakan dengan suatu program standar kelulusan UN dalam upaya peningkatan kualitas agar lebih bisa bersaing; ketika itu juga pihak-pihak yang terkait, khususnya pelajar sekolah seolah dipaksa untuk bisa berkualitas dan bersaing meski mereka harus bernafas tersenggal-senggal. Fenomena tersebut terjadi karena tidak semua sekolah di Indonesia ini memiliki kualitas yang membanggakan. Terlebih bagi mereka yang berada di pelosok dan dipedalaman daerah yang belum berkembang, tentu dari sarana dan prasarana saja mereka sudah kalah bersaing.

Tidak dapat dipungkiri, hadirnya kebijakan pemerintah melalui program standar kelulusan UN di tengah-tengah kondisi pendidikan kita saat ini, selain membawa suatu kecemasan kontroversi dan problem-problem baru juga mampu

membawa inovasi-inovasi baru bagi pemerintah untuk lebih kreatif dan berani dalam menciptakan program-program baru yang mendukung. Salah satunya yang perlu mendapat perhatian adalah rencana Depdiknas dalam meluncurkan program televisi pendidikan yang sudah dimulai sejak 17 Juli 2006 lalu. Program yang bekerja sama dengan TVRI tersebut akan menayangkan program tiga mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional atau yang umum disebut UN, setiap hari Senin-Kamis, pukul 07.00-09.30 WIB. Sasarannya siswa kelas III di 28.376 SMP Negeri dan swasta di 353 kabupaten/kota yang dianggap minim fasilitas dan belum memiliki kemampuan standar.⁵ Namun semua program-program pemerintah tersebut tentunya akan berhasil jika ada kerjasama yang baik antara pihak pembuat kebijakan dengan pihak pelaksana kebijakan.

Di D.I Yogyakarta yang pernah menyandang sebutan sebagai kota pelajar juga tidak luput dari rasa keresahan yang sama dengan daerah yang lainnya, akibat adanya kebijakan tersebut. Karena bagaimanapun juga anggapan masyarakat terhadap kebijakan tersebut, jika telah dikeluarkan maka siap tidak siap harus mampu dilaksanakan. Toh pada dasarnya pemerintah kita telah lebih dulu memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi bila dikeluarkannya kebijakan tersebut. Mungkin karena ketegasan dari pemerintah inilah yang membuat mental para pelajar kita sedikit terguncang dan menganggap program standar kelulusan UN adalah momok yang mengerikan yang tanpa pandang bulu mampu menghalangi siapapun menuju masa depan yang diimpikan. Secara akademik para pengajar dan

pihak-pihak terkait pun seolah dipaksa agar lebih bisa kreatif lagi dalam mengolah metode belajar yang sudah berjalan selama ini, agar lebih efektif dan mampu meminimalisir jumlah kegagalan pelajar dalam mencapai kelulusan.

Meninjau perkembangan pendidikan di Yogyakarta terutama di kabupaten Kulon Progo, dalam proposal skripsi ini akan membatasi ruang lingkupnya hanya pada SMA Negeri 1 Lendah saja. Karena SMA inilah yang nantinya akan dijadikan obyek dalam penelitian.

SMA N 1 Lendah sendiri merupakan SMA yang tidak terlalu jauh ketinggalan dengan sekolah menengah lainnya yang ada di kabupaten Kulon Progo. SMA ini merupakan sekolah menengah yang sedang berkembang dan aktif dalam memperbaiki kualitas pendidikan yang dimilikinya. Pada tahun pelajaran 2005/2006 SMA N 1 Lendah pada kelas tiganya memiliki jumlah siswa sebanyak 174 siswa, kelas tiga sendiri terbagi menjadi 2 jurusan, yaitu jurusan IPA dan jurusan IPS. Pada jurusan IPA memiliki 2 kelas dan pada jurusan IPS memiliki lebih banyak kelas yaitu 3 kelas.

Dari informasi yang penulis peroleh, para siswa khususnya kelas III merasakan bahwa program standar kelulusan yang pada tahun ajaran 2005/2006 adalah 4,26 merupakan program dari pemerintah yang sangat berat yang wajib mereka pikul. Akan tetapi semua itu merupakan tuntutan yang wajib mereka lalui untuk mencapai kelulusan. sehingga mereka pun dituntut mampu beradaptasi dengan

.....



1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

dikatakan memuaskan. Namun semangat belajar mereka yang masih bergelora memaksa mereka untuk terus berusaha semampu mereka menahluikkannya.⁶

Semangat mereka memang tidak sia-sia, terbukti dengan banyaknya siswa yang lulus pada tahun pelajaran 2005/2006 dengan nilai standar kelulusan sebesar 4,26. yang tercatat sebagai siswa tidak lulus 1 diantaranya berasal dari jurusan IPA dan 5 diantaranya berasal dari IPS. Adapun mata pelajaran yang diujikan masih sama dengan tahun-tahun yang lalu. Matematika, Bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris untuk kelas IPA serta Ekonomi, bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris untuk kelas IPS.

B. PERUMUSAN MASALAH

Bagaimana hasil yang mampu dicapai sekolah dari kebijakan Standar Kelulusan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2005/2006?

Apakah Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Standar Kelulusan Ujian Nasional di sekolah?

C. KERANGKA DASAR TEORI

Kerangka dasar teori merupakan bagian yang menguraikan variable-variabel dan hubungan-hubungan antar variable berdasarkan uraian definisi tertentu. Di dalam kerangka dasar teori ini akan diuraikan teori yang menjadi pedoman dalam penelitian yang dilakukan.

Menurut pendapat Koentjroningrat,⁷

“Teori adalah pernyataan mengenai adanya suatu hubungan antara gejala yang diteliti dalam satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat”.

Sedangkan menurut pendapat Masri Singaribuan dan Sofyan Effendi,⁸

“Teori merupakan penelitian yang paling besar perannya bagi peneliti, karena didalam unsur inilah peneliti mencoba menerangkan fenomena alami yang menjadi pusat perhatiannya”.

Dengan demikian teori merupakan uraian definisi yang merupakan konsep untuk menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun hubungan alami yang kan dipelajari dan diteliti. Sedangkan landasan pemikiran yang menjadi pedoman atau acuan dalam penelitian ini adalah:

1. Kebijakan

Secara estimologis kebijakan berasal dari kata *policy*, kata itu bisa diartikan sebagai kata politik, karena pada hakekatnya proses pembuatan keputusan atau

⁷ Koentjroningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. PT. Gramedia, Jakarta, 1991, hal. 19.

kebijakan merupakan proses merumuskan masalah. Dan kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang terjadi dalam proses politik.

W. I. Jenkins (tahun 1978) merumuskan,⁹

“Kebijakan sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seseorang atau kelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut”.

Miftah Thoha menyatakan kebijakan dalam arti luas. Ada dua aspek pokok yaitu: ¹⁰ pertama, *policy* merupakan praktika sosial, bukan *event* tunggal dengan demikian sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat. Kedua, *Policy* adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan baik untuk mendamaikan “*claim*” dari pihak-pihak konflik atau untuk menciptakan “*incentive*” bagi tindakan bersama dengan pihak yang menetapkan tujuan akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.

R. S. Parker memberikan pengertian kebijakan sebagai,

“ suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh suatu pemerintah pada periode tertentu dalam hubungan dengan suatu subyek

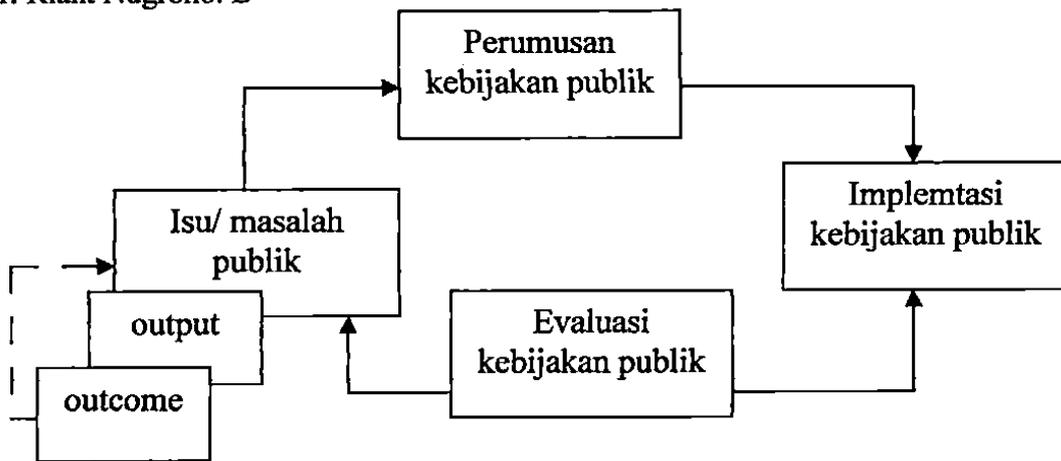
⁹ Dr. Solichin Abdul Wahab. Analisa Kebijakan. Bumi Aksara, Jakarta, 2001, Hal. 4.

sehingga muncul suatu tanggapan terhadap suatu permasalahan yang ada di masyarakat".¹¹

I. Siklus skematik kebijakan publik

Gambar 1.1

Sumber: Riant Nugroho, D.¹²



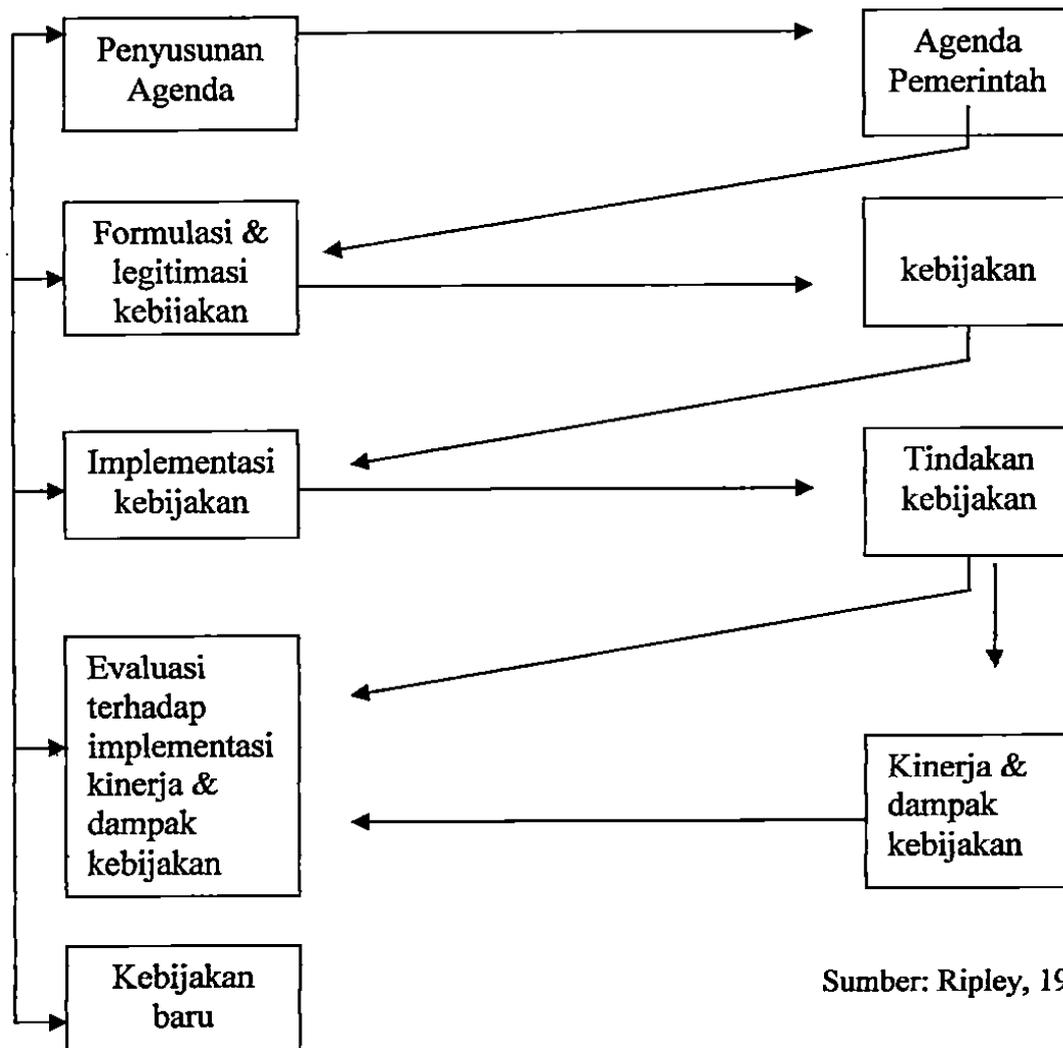
Dengan melihat skema tersebut maka kita dapat mengetahui tiga komponen pokok yang berkenaan dalam proses kebijakan publik. Komponen-komponen tersebut adalah: Perumusan kebijakan; Implementai kebijakan; Evaluasi kebijakan.

¹¹ Muchamad Zaenuri. Catatan Kuliah, Seminar Kebijakan Publik, 2006.

¹² Riant Nugroho, D. Muchamad Zaenuri. Kebijakan Implementasi dan Evaluasi. P.T. Elay Media

II. Tahapan Kebijakan Publik

Gambar 1.2
Skema Tahapan Kebijakan



Sumber: Ripley, 1985:45.¹³

Dalam skema tahapan kebijakan publik tersebut dijelaskan bahwa dalam tahapan proses kebijakan publik, kita perlu melalui tahapan agenda setting, kemudian

formulasi dan legitimasi, implementasi kebijakan, evaluasi dampak kebijakan, dan yang terakhir penentuan masa depan kebijakan.¹⁴

Dalam penyusunan agenda kebijakan ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan yaitu;¹⁵ (1) membangun persepsi dikalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Sebab bisa jadi suatu gejala oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang lain atau elite politik bukan dianggap masalah; (2) Membuat batasan masalah; (3) Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah.

Dari skema diatas kita dapat merumuskan komponen-komponen yang ada dalam tipe studi kebijakan publik secara luas, yaitu mencakup:¹⁶

- 1) ***Proses dan Formulasi Kebijakan***; merupakan kajian kritis terhadap munculnya suatu kebijakan publik, apakah kebijakan publik dibuat sudah melibatkan partisipasi masyarakat dan bagaimana cara merumuskan kebijakan publik agar memang benar-benar berorientasi pada untuk kepentingan masyarakat yang luas.
- 2) ***Implementasi Kebijakan***; studi ini lebih menitik beratkan pada pelaksanaan dari kebijakan publik.
- 3) ***Evaluasi Kebijakan***; kajian tentang dampak diberlakukannya suatu kebijakan. Setiap kebijakan selalu menghasilkan dampak yang diharapkan

¹⁴ Drs. Muchamad Zaenuri, M. Si. Hand-Out: Proses kebijakan publik dan agenda setting. 2006. Hal.

¹⁵ Atik Septia Winarsih. Op. Cit

maupun yang tidak diharapkan, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Semua jenis dampak itu menjadi subjek dari studi evaluasi.

- 4) **Analisis Kebijakan**; apabila ketiga tipe diatas berasumsi bahwa suatu kebijakan pemerintah itu sebagai suatu yang *given* (tidak dipersoalkan), studi ini justru mempersoalkan kebijakan dan instrumen-instrumennya.

Menurut William N. Dunn, ada 5 tipe model kebijakan, yaitu:¹⁷

- 1) **Metode Deskriptif**; tujuan model deskriptif ini adalah menjelaskan dan memprediksikan sebab-sebab konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan. Model ini digunakan untuk memantau hasil-hasil dari aksi-aksi kebijakan.
- 2) **Model Normatif**; tujuannya bukan hanya menjelaskan dan atau memprediksi tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas (nilai).
- 3) **Model Verbal**; dalam menggunakan model verbal analisis bersandar pada penilaian nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan rekomendasi.
- 4) **Model Simbolis**; menggunakan simbol-simbol matematis untuk menerangkan hubungan diantara variabel-variabel kunci yang dipercaya mencirrii suatu masalah.
- 5) **Model Prosedural**; menampilkan hubungan yang dinamis diantara variabel-variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan.

¹⁷ Dunn, William N. *Public Policy Analysis*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1968. Hal. 161

2. Evaluasi

Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.¹⁸

Tidak jauh berbeda Charles O. Jones juga berpendapat bahwa,¹⁹
“Evaluasi adalah kegiatan yang dipersiapkan dan ditujukan untuk menilai mutu dan keberhasilan program pemerintah yang terutama sekali terdiri dari kegiatan-kegiatan pemilah-pemilah obyek, cara pengukuran dan metode analisa”.

Carol H. Weiss mengemukakan, bahwa:²⁰
“Evaluasi adalah suatu kata yang elastis yang dapat meluas meliputi penilaian kebenaran dan keberhasilan mengenai banyak hal”.

Dengan mengadakan evaluasi, maka suatu kebijakan maupun suatu program yang ditertibkan dapat diketahui atau dinilai kelemahan dan kekuarangannya sejak direncanakan sampai pada pelaksanaan untuk mencapai tujuan dalam memenuhi kepentingan masyarakat. Sehingga semua penilaian tersebut nantinya berisikan tentang penentuan keberhasilan dari setiap pelaksanaan suatu program atau kebijakan.

Dari uraian pengertian evaluasi maka dapat disimpulkan, bahwa evaluasi itu dapat dilakukan dengan dibedakan secara umum menjadi dua bentuk yaitu:²¹

¹⁸ William N. Dunn. Op. Cit, Hal. 608

¹⁹ Charles O. Jones. *Public Administration*, 1966, Hal. 1

²⁰ Carol H. Weiss. *Public Administration*, 1966, Hal. 1

a. Dilakukan secara teknis rasional (ilmiah) dengan kegiatan-kegiatan:

pemilahan-pemilahan objek (*specification*) dengan merinci apa saja yang akan dievaluasi.

- melakukan pengukuran tiap-tiap objek dalam koleksi data beserta menentukan pula ukuran-ukuran yang benar dan cocok untuk setiap objeknya (*measurement*).
- melakukan analisa dari segenap informasi yang ada (*analysis*).
- memberikan pendapat atau rekomendasi. Rekomendasi ini dapat bersifat "*advocative*", diharapkan untuk diikuti dan dilaksanakan, dapat pula bersifat "*coercive*", dipaksakan untuk dilaksanakan. Hal ini tergantung pada kedudukan formal dengan "*authority*"nya pelaku evaluasi itu.

b. Dilakukan secara umum, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh rakyat dengan berbagai macam kepentingan serta tingkat pengalaman dan pengetahuan yang berbeda. Dalam evaluasi ini sering terjadi titik berat (*stress*) penilaian yang berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lain. Disamping itu keterkaitan orang atau kelompok masyarakat dengan pendiri kelompok, ideologi dan pandangan atau pendapatan umum seringkali mewarnai kegiatan dan hasil evaluasi.

Selain mengetahui pengertian dan istilah evaluasi, kita juga perlu mengetahui komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam evaluasi, diantaranya adalah:

I. Sifat Evaluasi

Di dalam evaluasi terdapat beberapa sifat, diantaranya adalah: ²²

- Fokus Nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program
- Interdependensi Fakta Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”.
- Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau. Tuntutan evaluatif berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.
- Dualitas Nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.

II. Pendekatan-Pendekatan dalam Evaluasi

Pendekatan-pendekatan dalam evaluasi menurut N. Dunn, ²³ terdiri dari:

- *pendekatan Evaluasi Semu*
- *pendekatan Evaluasi Formal*
- *pendekatan Evaluasi Keputusan Teoritis.*

²² *Prinsip-prinsip Evaluasi Kebijakan Publik*, N. Dunn, Gajah Mada University Press, 1999, Hal

Ketiga jenis pendekatan tersebut sama-sama menggunakan metode diskriptif dalam menghasilkan informasi yang valid dan terpercaya, perbedaannya terletak pada teknik evaluasi atau teknik pengumpulan datanya.

Tabel 1.1
Pendekatan Evaluasi

Pendekatan	Tujuan	Asumsi	Bentuk Utama	Teknik
Evaluasi Semu	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi valid tentang hasil kebijakan.	Ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial.	Eksperimentasi Sosial; Akuntansi Sistem Sosial; Pemeriksaan Sosial; Sintesis Riset dan Praktek.	Sajian grafik; Tampilan tabel; Angka indeks; Analisis seri waktu.
Evaluasi Formal	Menggunakan metode diskritif untuk menghasilkan informasi terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program-kebijakan.	Tujuan sasaran dari pengambil kebijakan dan administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai.	Evaluasi pengembangan Evaluasi eksperimental Evaluasi proses retrospektif (expost) Evaluasi hasil retrospektif	Pemetaan sasaran Klarifikasi nilai Kritik nilai Pemetaan hambatan Analisis dampak-silang Discounting.
Evaluasi Keputusan Teoritis	Menggunakan metode diskriptif untuk menghasilkan informasi terpercaya & valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh pelaku kebijakan.	Tujuan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun diam-diam merupakan ukuran yang tepat dari manfaat/nilai.	Penilaian tentang dapat tidaknya dievaluasi Analisis utilitas multi atribut	Brainsorming Analisis argumentasi Delphi kebijakan Analisis survei-pemakai.

III. Fungsi Evaluasi

Menurut N. Dunn fungsi evaluasi terdiri dari:²⁴

- Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan.
- Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
- Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

3. Evaluasi Kebijakan

Berangkat dari pengertian evaluasi maka penulis juga perlu memaparkan pengertian mengenai evaluasi sebagai evaluasi kebijakan.

James E. Anderson mengatakan bahwa:²⁵

“Evaluasi kebijaksanaan, sebagai suatu kegiatan fungsional, adalah suatu kebijaksanaan itu sendiri. Pengambil-pengambil kebijaksanaan dan administrator-administrator senantiasa membuat penilaian terhadap dampak dari kebijaksanaan-kebijaksanaan khusus, program-program dan proyek-proyek yang dilaksanakan tersebut”.

James E. Anderson juga menambahkan bahwa,²⁶

“evaluasi kebijakan lebih sekedar proses teknis atau analitis, melainkan juga merupakan proses politis, dan selanjutnya evaluasi kebijaksanaan itu menunjukkan,

²⁴ Loc. Cit. Hal. 609

²⁵ Loc. Cit. Hal. 111

²⁶ Loc. Cit. Hal. 111

bahwa meskipun evaluasi itu dimaksudkan dengan tujuan yang tidak memihak dan objektif, akan menjadi politis atau kegiatan politik dengan terjadinya pengaruh terhadap alokasi sumber-sumber daya masyarakat”.

Adapun tujuan dari evaluasi kebijaksanaan itu adalah:²⁷

- a. Menunjukkan kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan-kesalahan;
- b. Menunjukkan cara atau metode yang lebih sesuai dengan kondisinya, dilihat dari sudut *cost& benefits*;
- c. Memberikan kritik-kritik membangun, yang dapat mencegah pelaksanaan kebijaksanaan terbawa oleh arus yang keliru;
- d. Memberikan pertimbangan kepada yang berwenang untuk memperbaiki, merubah, bahkan membatalkan program atau kebijaksanaan itu; serta usaha-usaha lain yang pada pokoknya mengarah dan membuat pelaksanaan kebijaksanaan atau program mencapai keberhasilan sebagaimana diharapkan dengan hasil dari berbagai macam kegiatan (*output*) yang semestinya.

Oleh karena itulah, maka umumnya penulis-penulis memberikan definisi evaluasi sebagai, “*judging the merit of government program*”, yang maksudnya

adalah menilai dan menilai keberhasilan pelaksanaan dan program program

4. Pendidikan

a. Pengertian Pendidikan

Berbicara mengenai pendidikan, banyak istilah ataupun pengertian yang beraneka ragam dalam mengungkapkan makna dari pendidikan tersebut. Pada umumnya, pengertian pendidikan dibahas melalui 2 cara, yaitu pertama secara etimologis atau secara asal kata tersebut dibentuk dan kedua secara definitif:

1) Secara Etimologis

Pengertian pendidikan berasal dari bahasa Yunani *Paedagogike*. Ini adalah kata majemuk yang terdiri dari kata "*PAES*" yang berarti "*Anak*" dan kata "*AGO*" yang berarti "*Aku membimbing*". Jadi *Paedagogike* berarti aku membimbing anak. Orang yang pekerjaannya membimbing anak dengan maksud membawanya ketempat belajar, dalam bahasa Yunani disebut *Paedagogos*. Jika kata ini diartikan secara simbolis, maka perbuatan membimbing seperti yang dikatakan diatas tersebut, merupakan inti perbuatan mendidik yang tugasnya hanya untuk membimbing saja, kemudian suatu saat harus melepaskan anak itu (kembali ke dalam masyarakat).²⁸

Dari bahasa latin pendidikan berasal dari kata *Educere*, yang berarti mengeluarkan suatu kemampuan. "*E*" adalah "*keluar dari*", "*ducere*" berarti "*memimpin*". Jadi *educere* adalah membimbing untuk mengeluarkan kemampuan yang tersimpan dalam diri anak untuk tercapainya kedewasaan.²⁹

²⁸ Drs. H. Abu Ahmad dan Dra. Nur Uhbiyanti. *Ilmu Pendidikan*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hal. 70

²⁹ Tim penyusun: Drs. Andang Heriawan, dkk. Editor: Drs. Dwi Nugroho Hidayanto. *Mengenal Manusia dan Pendidikan Liberty*. Yogyakarta, 1988 Hal 3

Pendidikan dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan *Education*, artinya pendidikan yang dikaitkan dengan pendidikan di sekolah. Karena sekolah adalah tempat anak itu dididik oleh pendidik secara formal. Jika pengertian *educere* dan *education* dihubungkan, maka pendidikan merupakan proses komunikasi atau proses interaksi antara manusia yang telah dewasa dengan manusia yang belum dewasa untuk mencapai suatu tujuan.³⁰

2) Secara Definitif

John Dewey mendefinisikan pendidikan sebagai, “proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia”.

Berbeda dengan Rousseau yang lebih memberi pengertian pendidikan sebagai, “pembekalan pada kita yang tidak ada pada masa kanak-kanak, akan tetapi membutuhkannya pada waktu dewasa”.³¹

SA. Branata mengemukakan, “pendidikan adalah usaha yang sengaja diadakan baik langsung maupun dengan cara tidak langsung untuk membantu anak dalam perkembangannya mencapai kedewasaannya”.³²

³⁰ Ibid

³¹ Drs. H. Abu Ahmad dan Drs. Nur Ukhivati, *Ilmu Pendidikan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hal

Secara legal yang disebutkan didalam GBHN (Tap. MPR No. IV/MPR/1973) “pendidikan adalah usaha sadar mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup”.³³

Crow and Crow mengemukakan,

“ the function of education must be recognized to be the guidance of a learner, at all stages of his wants, need, potentialities that will insure for him a personally satisfying and socially desirable pattern of living”.

“pendidikan tidak dipandang hanya sebagai usaha pemberian informasi dan keterampilan saja, namun diperluas sehingga mencakup usaha mewujudkan keinginan, kebutuhan dan kemampuan individu sehingga tercapai pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan”.³⁴

Syarif Tayeb mendefinisikan pendidikan sebagai,

“suatu usaha atau kegiatan yang dijalankan secara sengaja, teratur, dan terencana dengan maksud mengubah tingkah laku manusia yang di inginkan”.³⁵

Menurut Mashuri pendidikan adalah,

“usaha yang dilakukan dengan sadar demi pembinaan kepribadian dan mengembangkan kemampuan manusia Indonesia, jasmani dan rohani didalam keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam rangka pembangunan persatuan bangsa dan masyarakat adil dan makmur yang berazaskan pancasila”.³⁶

³³ Ibid hal. 70

³⁴ Tim penyusun: Drs. Andang Heriawan, dkk. Editor: Drs. Dwi Nugroho Hidayanto. Loc.cit, Hal. 2

³⁵ Syarif Tayeb. Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan bangsa. Dep P dan K, Jakarta, 1976, Hal. 34

³⁶ Siti Mujiana. 2001. Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Politik Terhadap Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilu Presiden 2004. hal. 9

Sedangkan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan No. 2 tahun 1989 pada pasal 1 disebutkan,³⁷

“pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/ atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang”.

Sedangkan pendidikan Nasional dalam pasal tersebut dijelaskan sebagai pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

b. Tujuan dan Fungsi pendidikan

Menurut UUD 1945 pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.³⁸

Sedangkan tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.³⁹

37. ...
38. ...
39. ...

- Pendidikan islam adalah kegiatan pendidikan yang berdasarkan falsafah dan pandangan hidup islam. Missal: pendidikan di Arab Saudi dan di beberapa Negara-negara Timur Tengah.
- Pendidikan katholik, adalah kegiatan pendidikan berdasarkan falsafah dan pandangan hidup katolik. Missal: pendidikan di negara Vatikan.

2) *Berdasarkan isi dan tujuan*

Menurut isi dan tujuan pendidikan, maka kegiatannya dapat dijumpai dalam bentuk:

- Pendidikan moral, kegiatan pendidikan ini sering disebut dengan pendidikan budoi pekerti, pendidikan etika, dan pendidikan akhlak. Tujuannya ialah untuk memberikan penilaian terhadap baik dan buruk dari tingkah laku manusia. Dari pendidikan moral ini anak diharapkan bisa memiliki tingkah laku dan nilai-nilai luhur dalam hidupnya.
- Pendidikan intelektual, kegiatan pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan daya nalar dan kecerdasan anak sesuai dengan tingkat kecakapan dan kecerdasan yang dimilikinya.
- Pendidikan ketrampilan, pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan dalam menjalani hidup, baik melalui ketrampilan fisik maupun ketrampilan lainnya.
- Pendidikan estetika, pendidikan ini bertujuan agar anak bisa menghayati dan menghargai akan nilai-nilai keindahan

3) Berdasarkan perkembangan usia pendidikan

Pertumbuhan dan perkembangan yang dialami individu memberikan pengaruh terhadap kegiatan pendidikan, seperti:

- Pendidikan masa konsepsi, adalah kegiatan pendidikan untuk membina janin yang tumbuh di dalam rahim ibu melalui konsep medis.
- Pendidikan setelah lahir, adalah kegiatan pendidikan yang dilaksanakan untuk memberikan pengalaman pertama kepada anak di dalam lingkungan hidup.
- Pendidikan anak, adalah kegiatan pendidikan yang dilaksanakan dalam proses identifikasi terhadap lingkungannya.
- Pendidikan pemuda, adalah kegiatan pendidikan yang dilaksanakan untuk mencari identitas diri dari lingkungannya.
- Pendidikan orang tua, adalah kegiatan pendidikan yang diselenggarakan untuk membentuk kepribadian secara utuh.

4) Berdasarkan struktur dan jenis pendidikan formal

Kegiatan ini merupakan isi dan sifat pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, seperti:

- Pendidikan umum, pendidikan yang dilaksanakan secara umum. Jadi belum diarahkan untuk pekerjaan tertentu. Pendidikan ini merupakan dasar untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi

- Pendidikan kejuruan, merupakan pendidikan yang sengaja diselenggarakan untuk tugas atau pekerjaan tertentu.
- Pendidikan keguruan, pendidikan yang diselenggarakan untuk menjadi profesi guru.
- Pendidikan khusus, pendidikan yang diselenggarakan secara khusus untuk anak-anak yang tidak normal.

d. Sifat-Sifat Pendidikan

Menurut sifatnya pendidikan di bedakan menjadi 3 bagian:

1) Pendidikan Informal

Menurut Abu Ahmad dan Nur Uhbiyati,⁴¹

“pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar sepanjang hayat. Pendidikan ini dapat berlangsung dalam keluarga dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam pekerjaan, masyarakat, keluarga, organisasi.”

Lebih lanjut menurut St. Vembriarto,

“pendidikan informal merupakan pendidikan yang diperoleh seseorang secara tidak sadar sejak seseorang lahir sampai mati di dalam keluarga, dalam pekerjaan dan pergaulan.”⁴²

Adapun ciri-ciri pendidikan informal menurut Philip H. Combe.⁴³

- Tidak diselenggarakan secara khusus

⁴¹ Op.Cit., Hal. 97

- Lingkungan pendidikannya adalah diadakan dengan maksud khusus menyelenggarakan pendidikan
- Tidak diprogramkan secara tertentu
- Tidak ada waktu belajar tertentu
- Metodenya tidak format

2) Pendidikan Formal

Abu Ahmad dan Nur Uhbiyati menyebutkan pendidikan formal sebagai,⁴⁴

“pendidikan yang berlangsung secara teratur, bertingkat dan mengikuti syarat-syarat tertentu secara ketat. Pendidikan ini berlangsung di sekolah”.

Pendidikan formal menurut Sanafiah Faisal,⁴⁵

“pendidikan yang bentuknya telah terstruktur secara hierarkhis, bentuk-bentuk secara kronologis dalam masalah pendidikan. Contohnya: Taman Kanak-kanak (TK), SD, SMP, SMU, Akademik, dan Perguruan Tinggi”.

Ciri-ciri pendidikan foramal menurut Philip H. Combe:⁴⁶

- Diselenggarakan secara khusus dibagi atas jenjang yang dimiliki secara hierarkhis
- Usia siswa disuatu jenjang relatif homogen
- Waktu pendidikan relatif lama sesuai dengan program pendidikan yang harus disesuaikan
- Isi pendidikan atau materi lebih banyak bersifat akademis dan umum

⁴⁴ Op. Cit. Hal. 97

⁴⁵ Sanafiah Faisal, *Dasar-Dasar Pendidikan dan Pembelajaran Regional* (Makassar: Alfabeta, 2010), hal. 100.

- Mutu pendidikan sangat ditekankan sebagai jawaban terhadap kebutuhan dimasa yang akan datang.

3) *Pendidikan Non Formal*

Selanjutnya yaitu Abu Ahmad dan Nur Uhbiyati mendefinisikan pendidikan non formal sebagai, “Pendidikan yang dilaksanakan secara teratur dan sadar tetapi tidak telalu mengikuti peraturan yang ketat”.⁴⁷

Sedangkan Sanafiah Faisal menyebutkan pendidikan non formal sebagai, “penyelenggara pendidikan persekolahan, isi pendidikannya terprogram, ada konsekuensi materi dan interaksi belajar yang sedikit banyak terkontrol serta adanya kredensial, meskipun tidak selalu memiliki sanksi legal”.⁴⁸

Dari pengertian diatas maka ciri-ciri pokok dari pendidikan non formal adalah:⁴⁹

- Pada umumnya tidak terbagi dalam jenjang
- Waktu penyampaian diprogramkan pendek
- Usia siswa umumnya tidak sama
- Para siswa pada umumnya berorientasi pada jangka pendek, praktis
- Adanya kredensial (ijazah, sertifikat, program dan lain-lain).

e. **Jenjang Pendidikan**

Menurut jenjang atau tingkatan pendidikan, jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

⁴⁷ Op. Cit. Hal. 97

⁴⁸ Loc. Cit. Hal. 44

⁴⁹

1) *Pendidikan Dasar*

Menurut UU No. 2 tahun 1989, pasal 13. Pendidikan dasar adalah,⁵⁰

“pendidikan yang diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan ketrampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah”.

Menurut Crow and Crow, pendidikan dasar merupakan,

“elementary education yang mempunyai bagian dari TK (Taman Kanak-kanak) dan pelaksanaan tujuan pendidikannya dihubungkan erat dengan TK.

Dalam peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 pasal 1 sebagai pelaksana UU No. 2 tahun 1989 disebutkan: pendidikan umum yang lamanya 9 tahun, diselenggarakan selama 6 tahun di Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan tingkat pertama atau satuan pendidikan yang sederajat.

Ciri-ciri esensi dari pendidikan dasar menurut tim pengarah dan tim materi peningkatan wawasan guru menyebutkan:⁵¹

- pendidikan dasar merupakan pendidikan umum. Pendidikan umum (general Education) mengandung arti bahwa pendidikan dasar merupakan pendidikan minimum yang berlaku yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat akhir-akhir pendidikan.

⁵⁰ Anggani Sudono M.A. Op. Cit. Hal. 7

⁵¹ Ibid. Hal. 7

- pendidikan dasar berlangsung sembilan tahun yaitu enam tahun di tingkat SD dan tiga tahun di tingkat SLTP atau yang sederajat. Hal ini bukan berarti pendidikan berada pada satu atap, melainkan tetap terpisah, meskipun keduanya merupakan pendidikan dasar.
- pendidikan dasar tidak bersifat uniform, meskipun pendidikan dasar merupakan pendidikan umum, tidak semua peserta didik mendapatkan materi yang kurikulumnya sama seluruhnya, atau bersifat uniform, melainkan di mungkinkan adanya perbedaan di luar materi muatan nasional yang berjumlah 42 jam setiap hari dan meliputi 13 bidang kajian, hal ini dijamin oleh UUSPN maupun PP No. 28 tahun 1990.
- pendidikan dasar dilakukan di jalur sekolah dan luar sekolah pada berbagai jenis dan bentuk satuan pendidikan.
- lulusan pendidikan dasar adalah setara lulusan pendidikan jalur sekolah maupun luar sekolah beserta wahananya, sehingga memberikan keleluasaan gerak bagi peserta didik. Hal ini dijamin dalam pasal 23 ayat (1) UUSPN “pendidikan Nasional bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan gerak kepada peserta pendidik”.

2) Pendidikan Menengah

Menurut UU No. 2 tahun 1989, Pada pasal 15 disebutkan sebagai, ⁵²

“pendidikan yang diselenggarakan untuk melanjutkan pendidikan dasar serta
 memberikan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan

mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi”.

Pendidikan menengah ini terdiri dari pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa atau khusus, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan.

3) Pendidikan Tinggi

“pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/ atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/ atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau kesenian”⁵³

5. Standar Kelulusan

Suatu standar merupakan suatu batasan yang harus dicapai. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata standar berarti,⁵⁴

“ukuran tertentu yang dijadikan sebagai patokan baik dalam bentuk ukuran untuk tingkat biaya hidup, maupun ukuran untuk sesuatu yang dianggap tetap nilainya, sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai (harga)”.

Berbeda dengan definisi standar yang terdapat pada kamus Webster (1988:15) yang menyebutkan:⁵⁵

⁵³ Ibid. Hal. 8

⁵⁴ —

- Sesuatu yang ditetapkan oleh kewenangan, kebiasaan, atau persetujuan bersama sebagai model atau pedoman.
- Sesuatu yang dibentuk dan ditetapkan oleh otoritas sebagai aturan untuk mengukur besaran, berat, luas atau mutu.

Dari definisi diatas, standar dapat dipahami sebagai sesuatu yang ditetapkan dan digunakan untuk mengukur kualitas dan kuantitas sesuatu. Dengan demikian standar menjadi ukuran baik buruknya capaian sesuatu, baik secara kualitas atau kuantitasnya.

Di dalam standar itu sendiri memiliki alat ukur untuk menentukan baik buruknya suatu capaian. Dengan demikian dalam suatu standar termuat:⁵⁶

Apa saja indikator yang diukur; Kualitas dan kuantitas yang diharapkan; Bagaimana melakukan pengukuran.

Untuk kata kelulusan yang dimaksud disini adalah keberhasilan dalam ujian sekolah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kelulusan adalah “berkaitan dengan ujian”.⁵⁷

Standar kelulusan sekolah ini diatur dalam PP. No 19 tahun 2005. PP inilah yang menjadi landasan operasional UN. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan standar dibagi menjadi sembilan macam yaitu:

1. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah

⁵⁶ *Amir, N. (2005). Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Kemendiknas, 2005. Hal 11*

2. **Standar Kompetensi Lulusan** adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
3. **Standar Isi** adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
4. **Standar Proses** adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
5. **Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan** adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
6. **Standar Sarana Dan Prasarana** adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
7. **Standar Pengelolaan** adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional

1. **Kebijakan** adalah suatu rangkaian aturan mulai dari proses, perumusan, penyusunan, pengesahan, sampai pelaksanaan yang dilakukan pemerintah yang melibatkan masyarakat.
2. **Evaluasi** adalah upaya penilaian terhadap sesuatu yang layakinya dinilai untuk diketahui besar kecilnya, baik buruknya ataupun cocok tidaknya hasil yang telah diciptakan.
3. **Evaluasi Kebijakan** adalah penilai terhadap suatu keputusan yang dilakukan melalui proses analisis maupun studi kelayakan untuk memperoleh kesepakatan bersama.
4. **Pendidikan** adalah usaha untuk membina kepribadian nasional dalam suatu lingkungan, sebagai upaya mengembangkan kemampuan manusia baik jasmani maupun rohani untuk meningkatkan pengetahuan umum yang lebih bersifat teoritis dalam jangka waktu yang panjang dan bertahap.
5. **Standar Kelulusan** adalah batas capaian nilai yang menjadi acuan untuk menentukan berhasil tidaknya seseorang dalam suatu ujian.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional dapat diartikan sebagai bagaimana cara mengukur atau melihat suatu variable yang terdiri dari beberapa indikator tertentu, sehingga penelitian yang akan dilakukakan benar-benar terarah dengan baik dan jelas.

Indikator-indikator yang akan diteliti oleh penulis adalah:

1. **Evaluasi Kebijakan** PD No. 10 Tahun 2005

Penelitian diskriptif itu sendiri menurut Winarno surachmad sebagai,⁶⁰ “penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang atau memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang aktual, data-data yang ada dikumpulkan, disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisis”.

2. Lokasi Penelitian

Daerah yang menjadi obyek penelitian ini adalah SMA N 1 Lendah yang beralamat di kelurahan Jati Rejo, kecamatan Lendah, dan berkabupaten di Kulon Progo.

Adapun alasan mengapa memilih SMA N 1 Lendah sebagai obyek penelitian adalah:

- a. SMA N 1 Lendah merupakan SMU yang sedang dalam tahap melakukan perubahan untuk menciptakan kualitas pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya.
- b. SMA ini sebelumnya belum pernah di jadikan obyek dalam penelitian, sehingga penulis tertantang untuk berusaha mengekspos keberadaannya dengan mengaitkan permasalahan pendidikan yang baru-baru ini menjadi topik menarik.
- c. Akses informasi, baik lokasi maupun data-data yang diperlukan dapat di jangkau oleh penulis.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian mengenai program standar kelulusan UN ini adalah untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh semua pihak yang terkait, khususnya pada SMA N 1 Lendah dengan di keluarkannya kebijakan tersebut.

4. Manfaat Penelitian

- a. Untuk mengetahui isi PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Kelulusan Pendidikan Nasional dan hasil evaluasinya.
- b. Untuk mengetahui hasil yang mampu dicapai sekolah dari Program Standar Kelulusan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2005/2006.
- c. Untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh, baik faktor yang mendukung maupun faktor yang menjadi penghambat keberhasilan program tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. **Observasi**; adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis dan dilakukan dengan sengaja, terhadap gejala-gejala yang diteliti.
 - b. **Interview**; merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan dialog dan Tanya jawab kepada seorang responden secara
- mendapatkan informasi yang diinginkan. Di sini peneliti

melakukan interview dengan pihak-pihak sekolah SMA N 1 Lendah dan responden di Dinas pendidikan kabupaten Kulon Progo.

- c. **Dokumentasi**; suatu usaha mengumpulkan data dengan mencatat atau pun merekam serta mengambil gambar mengenai data-data yang dianggap mendukung proses penelitian di daerah tersebut.

6. Unit Analisis

- a. Para guru, siswa-siswi dan kepala sekolah SMA N 1 Lendah
- b. Dinas Pendidikan kabupaten Kulon Progo
- c. Pemda Kabupaten Kulon Progo
- d. Bapeda Kulon Progo

7. Data dan Sumber Data

Berhubung metode penelitian yang digunakan adalah metode diskriptif dan analisis data bersifat kualitatif maka dibutuhkan data primer dan data sekunder.

- a. **Data Primer** adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara observasi dan alat lainnya. Data primer dalam penelitian ini didapat langsung dari responden atau unit analisa.
- b. **Data Sekunder** adalah data yang diperoleh dari atau dari bahan

Dari data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder maka langkah selanjutnya yang diambil penulis adalah menganalisis secara logis dan sistematis.

8. Teknik Analisa Data

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan maka penulis menggunakan analisis data yang bersifat *Kualitatif*. Pengertian *Metode Kualitatif* adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dengan perilaku yang diamati.⁶¹ Akibat dari metode diskriptif yang digunakan, maka analisis data bersifat kualitatif, sehingga membutuhkan data penelitian yang bersifat primer dan sekunder.

Dalam hal ini Winarno Surachmad menjelaskan sebagai berikut:⁶²

“data primer adalah data yang lengkap dan sengaja diperoleh dari sumber data yang langsung oleh penyelidik, sedangkan data sekunder adalah data yang terpilih dikumpulkan dan oleh orang luar dari penyelidik”.

⁶¹ Lexy Moleng, *Metodelogi Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hal. 103